



PERANAN APARAT KAMPUNG DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI DI KAMPUNG SIEPKOSI JAYAWIJAYA PAPUA

Agustinus Siep¹, Irmayani Misrah², Bambang Supeno Domi³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena

Jl. Hom-Hom Wamena Jayawijaya Papua, Indonesia

Email Korespondensi: siepagustinus@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran aparat kampung dalam pelaksanaan administrasi di kampung siepkosi distrik siepkosi kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini dilakukan di Kampung Siepkosi Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Penelitian ini dikaji dari dua aspek yakni administrasi umum dan administrasi kampung. Instrumen yang penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert alternative jawaban Baik (3), cukup baik (2), dan tidak baik (1). Teknik Analisa data digunakan dengan rumus persentase. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 orang. Berdasarkan dari hasil penelitian ditemukan bahwa Aparat kampung Siepkosi Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya cukup berperan dalam pelaksanaan administrasi dikampung tersebut. Jika kita lihat dari segi pendidikan mereka tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), ada juga sebagian yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Disamping itu sekalipun sarana dan prasarana masih ada kekurangan, namun semangat kerja mereka sangat memuaskan dan dapat dipakai sebagai panutan masyarakat. Adanya kemampuan dari aparat untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mempengaruhi dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat, dan selalu mengadakan koordinasi dalam setiap melaksanakan tugas, sehingga nantinya atas dasar koordinasi tersebut akan merupakan modal awal dalam melaksanakan pembenahan administrasi dikampung Siepkosi Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya.

Kata Kunci: Aparat Kampung, Administrasi, Papua

THE ROLE OF VILLAGE APPARATUS IN IMPLEMENTING ADMINISTRATION IN SIEPKOSI VILLAGE JAYAWIJAYA PAPUA

Abstract

This research aims to find out the role of village officials in implementing administration in Siepkosi village, Siepkosi district, Jayawijaya district. This research was conducted in Siepkosi Village, Siepkosi District, Jayawijaya Regency for approximately 2 (two) months. This research is studied from two aspects, namely general administration and village administration. The instrument for this research uses a questionnaire with an alternative Likert scale of answers Good (3), quite good (2), and not good (1). The data analysis technique is used with a percentage

formula. The number of samples used was 30 people. Based on the research results, it was found that Siepkosi village officials, Siepkosi District, Jayawijaya Regency played quite a role in implementing administration in the village. If we look at their education, they have completed junior secondary school (SLTP), there are also some who have senior secondary school (SLTA) education. Apart from that, even though the facilities and infrastructure are still lacking, their work enthusiasm is very satisfying and can be used as role models for society. There is the ability of the apparatus to improve higher education, thereby influencing the impact on services to the community, and always coordinating in every task, so that later on the basis of this coordination it will be the initial capital in carrying out administrative improvements in the Siepkosi village, Siepkosi District, Jayawijaya Regency.

Keywords: Village Officials, Administration, Papua

Pendahuluan

Terselenggaranya suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) adalah syarat utama dalam mewujudkan keinginan masyarakat dalam menuju cita – cita bangsa dan negara. Untuk menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu, diperlukan penerapan suatu sistem pertanggungjawaban yang cepat, tepat sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dikampung Siepkosi dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dimana setiap individu jajaran aparatur bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Untuk menjamin terwujudnya pemerintahan yang baik dan berwibawa (good governance) demi terwujudnya pelaksanaan administrasi kampung, maka fungsi dan tugas pokok dan tanggung jawab aparat pemerintahan dituntut untuk bekerja lebih semangat dan profesional.

Tugas aparatur pemerintah secara umum adalah melayani kepentingan public, serta kebutuhan masyarakat, keinginan dan cita – cita masyarakat yang terakomodasikan dalam proses pemerintahan sehingga dapat memenuhi kebutuhan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Sementara itu undang – undang No 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus dan pelaksanaan undang – undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, mempunyai arti yang amat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, untuk menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran bagi masyarakat melalui kegiatan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun demi peningkatan kesejahteraan lahir dan batin, adil dan merata.

Otonomi daerah menjadi hak serta wewenang dan kewajiban daerah untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri tanpa intervensi yang berlaku. Otonomi daerah memaksa organisasi – organisasi pemerintah memberdayakan serta mengoptimalkan seluruh sumber daya manusia yang ada guna meningkatkan kinerja aparaturnya.

Daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berhak serta wewenang untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Sumber daya aparatur yang dimiliki sangat terbatas dan apabila tidak dikelola dengan baik, maka dalam menjalankan tugasnya dalam pemerintahan tidak akan berjalan dengan apa yang diharapkan.

Sumber daya aparatur menempati kedudukan yang paling penting diantara sumber daya yang lainnya, dengan demikian bagaimanapun melimpahnya sumber daya yang lain tanpa didukung sumber daya aparatur yang berkualitas tidak akan terpenuhi apa yang menjadi harapan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pada tanggal 30 desember 2005 Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang – Undang nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa/ Kampung. Peraturan tentang Pemerintahan Desa tersebut bertujuan untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan administrasi pemerintahan yang makin meluas dan efektif.

Dengan berlakunya Undang – Undang nomor 72 Tahun 2005 yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan untuk menyeragamkan kedudukan Pemerintahan Desa dan

ketentuan adat istiadat yang masih berlaku, maka secara otomatis secara kesatuan Pemerintah Desa yang disebut warga dihapuskan dengan perangkat – perangkatnya yang ada dan sekaligus dibentuk Pemerintahan Desa yang lingkup kekuasaannya meliputi wilayah dusun lama yang berada dibawah naungan eks warga yang dihapuskan.

Dalam kenyataannya proses Pembangunan Desa yang dalam Undang – Undang nomor 21 Tahun 2001 disebut kampung, menimbulkan kesulitan – kesulitan dalam pengertian dana dan tenaga – tenaga ahli. Proses Pembangunan kampung haruslah dimulai dengan tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi dan dilaksanakan dengan inisiatif, prakarsa dan kemampuan masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut diuraikan dalam Undang – Undang nomor 72 Tahun 2005, Pemerintahan Desa/ Kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari Pemerintah Kampung dan Lembaga Permusyawaratan Kampung. Dalam Pasal 12, disebutkan bahwa perangkat Desa/ Kampung terdiri dari Sekertaris Kampung, Pelaksanaan Teknik Kampung, dan Unsur Kewilayahan.

Ditinjau dari perspektif otonomi daerah maka penerapan pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan suatu urgenitas dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang good governance serta bebas dari bermacam – macam bentuk penyalahgunaan, hak dan wewenangnya. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari peran serta aparatur disamping itu juga dipengaruhi berbagai faktor antara lain partisipasi dari masyarakat.

Hal tersebut karena dengan menerapkan prinsip – prinsip pemerintahan yang good governance, maka akan memberikan peluang lebih besar lagi bagi terlaksananya asas desentralisasi serta prinsip – prinsip otonomi sehingga pelaksanaan pemerintahan mampu menyelenggarakan tugas – tugas pelayanan serta pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dan berdaya guna serta tidak bergantung pada atasannya. Fungsi dan peranan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan administrasi dan pembangunan, tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik belaka namun tidak kalah pentingnya dalam pelayanan tertib administrasi pemerintahan.

Sehingga untuk mendukung pelaksanaan administrasi dan pembangunan secara berkesinambungan, bertahap dan menuntut adanya aparatur pelaksana yang mampu menjalankan roda pemerintahan, membina masyarakat serta mampu memecahkan permasalahan yang muncul.

Berdasarkan kenyataan peranan aparat pemerintahan kampung Siepkosi Distrik Siepkosi dalam pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan kampung sangat kurang sekali. Hal ini terlihat kurang disiplinnya aparat kampung dalam menjalankan tugas, kurangnya pengetahuan tentang administrasi pemerintahan kampung, penataan administrasi yang kurang baik, sehingga semua ini dapat mempengaruhi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pengertian umum pelaksanaan administrasi pemerintahan kampung merupakan tindakan dari administrasi dalam segala bidang dan bukan merupakan hasil pelaksanaan tugas pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang ditetapkan sebelumnya.

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari seorang aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini nampak jelas digariskan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar tahun 1945 pada alinea ke 4 (empat) yang meliputi empat aspek dalam pelayanan kepada masyarakat yaitu : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan pada uraian diatas penulis sangat tertarik untuk meneliti dan menganalisa permasalahan – permasalahan yang ada dalam pelaksanaan administrasi dikampung Siepkosi Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya dengan mengangkat judul penelitian yaitu peranan aparat kampung dalam pelaksanaan administrasi di kantor distrik siepkosi kabupaten jayawijaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran aparat kampung dalam pelaksanaan administrasi di kampung siepkosi distrik siepkosi kabupaten jayawijaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Siepkosi Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Penelitian ini dikaji dari dua aspek yakni administrasi umum dan administrasi kampung. Instrumen yang penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert alternative jawaban Baik (3), cukup baik (2), dan tidak baik (1). Teknik Analisa data digunakan dengan rumus persentase. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Sampel Penelitian

NO	SAMPEL	JUMLAH
1	Aparat Kampung	6 Orang
2	BPMK	10 Orang
3	Tokoh Masyarakat	5 Orang
4	Tokoh Agama	5 Orang
5	Tokoh Pemuda	4 Orang
Total Sampel		30 Orang

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh melalui penyebaran angket/kuesioner mengenai indikator administrasi umum yaitu : Perilaku aparat kampung dalam mengelola administrasi, Aparat kampung dalam melayani masyarakat diperoleh, Ketrampilan aparat kampung dalam menjalankan tugas, Tanggapan responden berkaitan dengan pelaksanaan administrasi dikampung Siepkosi Distrik Siepkosi, Perilaku aparat kampung dimata masyarakat sebagai panutan, Pencatatan dan pengarsip data kependudukan dikampung Siepkosi Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya, nilai rata – rata presentase pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Rata – Rata Presentase Indikator Administrasi Umum

No	Uraian	Kategori jawaban		
		A	B	C
1	Pengetahuan yang dimiliki	23 %	50 %	17 %
2	Pelayanan aparat	23 %	50 %	27 %
3	Ketrampilan	30 %	53 %	17 %
4	Pelaksanaan administrasi	43 %	50 %	7 %
5	Pengelolaan administrasi	26 %	60 %	14 %
6	Pencatatan dan pengarsipan	10 %	63 %	27 %
Jumlah Rata – Rata		28 %	54 %	18 %

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai rata – rata persentase untuk presentase indikator administrasi umum yaitu: Pengetahuan yang dimiliki, Pelayanan aparat, Ketrampilan, Pelaksanaan administrasi, Pengelolaan administrasi, dan Pencatatan dan pengarsipan.

Nilai Rata–Rata Persentase Indikator Administrasi Penduduk

Kemudian langkah selanjutnya akan disajikan hasil nilai rata – rata persentase indikator administrasi penduduk sebagai berikut berikut ini:

Tabel 3. Rata – Rata Presentase Indikator Administrasi Penduduk

No	Uraian	Kategori jawaban		
		A	B	C
1	Perilaku aparat kampung dalam melayani masyarakat.	23 %	44 %	33 %
2	Perilaku aparat kampung dalam mengelola administrasi.	17 %	57 %	26 %
3	Perilaku aparat kampung dimata masyarakat sebagai panutan	40 %	50 %	10 %
4	Pelaksanaan administrasi	13 %	57 %	30 %
5	Penyimpanan arsip dan data	6 %	64 %	30 %
6	Pelaksanaan administrasi kependudukan	37 %	50 %	13 %
Jumlah Rata – Rata		23 %	54 %	23 %

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai rata – rata presentase untuk presentase indikator administrasi penduduk yaitu : Perilaku aparat kampung dalam melayani masyarakat, Perilaku aparat kampung dalam mengelola administrasi, Perilaku aparat kampung dimata masyarakat sebagai panutan, Pelaksanaan administrasi, Penyimpanan arsip dan data, dan Pelaksanaan administrasi kependudukan.

Nilai Rata – Rata Presentase Peran Aparat Kampung Dalam Pelaksanaan Administrasi

Kemudian langkah selanjutnya akan disajikan hasil nilai rata – rata presentase variabel peran aparat kampung dalam pelaksanaan administrasi dengan indikator administrasi umum dan administrasi penduduk, sebagai berikut berikut ini:

Tabel 4. Nilai Rata – Rata Presentase Peran Aparat Kampung Dalam Pelaksanaan Administrasi

No.	Indikator	Kategori jawaban		
		A	B	C
1	Administrasi Umum	28 %	54 %	18 %
2	Administrasi Penduduk	23 %	54 %	23 %
Jumlah		26 %	54 %	20 %

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai rata – rata presentase untuk variabel peran aparat dengan indikator : administrasi umum, dan administrasi penduduk diperoleh nilai sebesar 54 %. Apabila nilai tersebut diinterpretasikan kedalam predikat jawaban, maka nilai tersebut masuk dalam kategori 52 – 77 % yaitu cukup baik.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aparat kampung Siepkosi Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya cukup berperan dalam pelaksanaan administrasi dikampung tersebut. Jika kita lihat dari segi pendidikan mereka tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), ada juga sebagian yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Disamping itu sekalipun sarana dan prasarana masih ada kekurangan, namun semangat kerja mereka sangat memuaskan dan dapat dipakai sebagai panutan masyarakat.
2. Adanya kemampuan dari aparatur untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mempengaruhi dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.

3. Selalu mengadakan koordinasi dalam setiap melaksanakan tugas, sehingga nantinya atas dasar koordinasi tersebut akan merupakan modal awal dalam melaksanakan pembenahan administrasi dikampung Siepkosi Distrik Siepkosi Kabupaten Jayawijaya.

Referensi

- Amirin, Tatang M. 1990. Menyusun Rencana Penelitian, Rajawali Press J
- Beratha, I Nyoman. 1992. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan. Ghalia Indonesia.
- Kartono, Kartini. 1993. Pemerintahan dan Kepemimpinan. Rajawali Press.
- Rasyid, M. 1992. Pembangunan Kualitas dan Usaha-Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah. Universitas Tadulako Palu
- Saparin, Sumber. 1996. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Ghalia Indonesia.
- Sawe, Jamaluddin. 1996. Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan. APDN Press.
- Siagian, SP. 1991. Administrasi Pembangunan. Haji Masagung. Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1984. Metode Penelitian Survey. LP3ES.
- Syarif, Roesli. 1991. Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaan. Bina Aksara. Bandung
- Tjiptoherianto, Prijono. 1993. Pembangunan Sumber Daya Manusia. Prisma.
- Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir. 2007. Prospek Pembangunan Desa. Bandung:Fokusmedia.
- Widjaya, A.W.. 2013. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.